



DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: 170/SK-24/DPRD/11/2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa Penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Persetujuan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke 25 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 30 November 2024 tentang Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Persetujuan Bersama terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.
- KEDUA : Judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat diubah bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 30 November 2024

 **KETUA**
JUNAIDI, S.Sos., M.Si.

LAMPIRAN

KESEPAKATAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI KARTANEGARA DAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025
NOMOR : 170/SK-24/DPRD/12/2023 DAN NOMOR 19/SKB/HK/2024
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2024

NO	JUDUL	MATERI	SIFAT BARU/UBAH/CABUT	TAHUN PENYEMPAAIAN KE DPRD	TAHUN PELAKSANAAN	PENGUSUL	KETERANGAN
1.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO 4 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	PENYESUAIAN UU 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU 12 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	UBAH	2023	2024	BAPEMPERDA DPRD	SELESAI DIBAHAS, SEBAGAI DASAR PERSETUJUAN
2.	PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN	PEMBERDAYAAN PEDAGANG KECIL, PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR, DUKUNGAN KEBERSIHAN DAN KEAMANAN, LARANGAN MONOPOLI, PENGAWASAN DAN PENEKAKAN, DIVERSIFIKASI PRODUK, PASAR BERSIH DAN RAMAH LINGKUNGAN, KEAMANAN KONSUMEN	BARU	2023	2024	BAGIAN EKONOMI BUPATI	SELESAI DIBAHAS, SEBAGAI DASAR PERSETUJUAN

3.	PERUBAHAN ATAS PERDA KAB KUKAR NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH TUNGGAH PARANGAN MENJADI PT TUNGGAH PARANGAN PERSERODA	RENCANA PEMINDAHAN ASET YANG DIMILIKI OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG MASUK KEDALAM OTORITA IKN DALAM BENTUK KERJASAMA PENGELOLAAN ASET	UBAH	2023	2024	BAPEMPERDA DPRD	SELESAI DIBAHAS, SEBAGAI DASAR PERSETUJUAN
4.	PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN	CABUT	2022	2023	DPRD	SELESAI DIBAHAS, SEBAGAI DASAR PERSETUJUAN
5.	PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI	PENATAAN	UBAH	2022	2023	BUPATI	SELESAI DIBAHAS, SEBAGAI DASAR PERSETUJUAN
6.	RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2024-2044	PENATAAN KAWASAN INDUSTRI		2021	2023		SELESAI DIBAHAS, SEBAGAI DASAR PERSETUJUAN
7.	PEMBENTUKAN DESA MANGKURAWANG DARAT	PEMEKARAN DESA	BARU	2024	2025	BRIDA DAN DPMD	
8.	PEMBENTUKAN DESA JEMBAYAN ILIR	PEMEKARAN DESA	BARU	2024	2025	DPMD	
9.	PEMBENTUKAN DESA LOA DURI SEBERANG	PEMEKARAN DESA	BARU	2024	2025	DPMD	

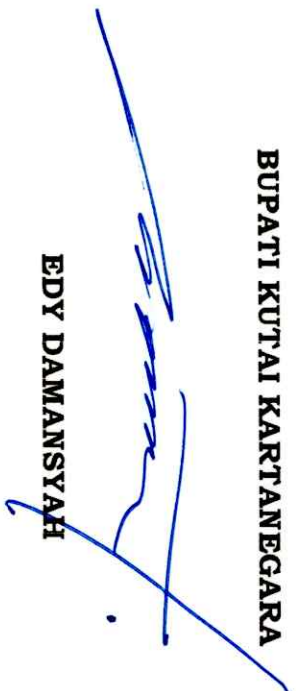
10.	PEMBENTUKAN DESA BADAK MAKAMUR	PEMEKARAN DESA	BARU	2024	2025	DPMD	
11.	PEMBENTUKAN DESA SUNGAI PAYANG ILIR	PEMEKARAN DESA	BARU	2024	2025	DPMD	
12.	PEMBENTUKAN SUMBER REJO	PEMEKARAN DESA	BARU	2024	2025	DPMD	
13.	PEMBENTUKAN DESA TANJUNG BARUKUNG	PEMEKARAN DESA	BARU	2024	2025	DPMD	
14.	PEMBENTUKAN DESA KEMBANG JANGGUT ULU	PEMEKARAN DESA	BARU	2024	2025	DPMD	
15.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI	PENYESUIAN KETENTUAN UMUM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI	UBAH	2024	2025	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
16.	PERIKANAN AIR TAWAR BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	PERAIRAN AIR TAWAR DAN LAHAN PEMBUDIDAYAAN IKAN MENGANDUNG POTENSI SUMBERDAYA YANG TINGGI, SEHINGGA DENGAN MEMPERHATIKAN DAYA DUKUNG YANG ADA DAN KELESTARIANNYA DAPAT DIMANFAATKAN BAGI KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	BARU	2023	2025	DPDR	LENGKAP PENGKAJI UNMUL PERIKANAN

17.	PENGEMBANGAN, PEMBIINAAN DAN PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA KUTAI	SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMELIHARA BAHASA DAN SASTRA KUTAI KARTANEGARA MELINDUNGI KEBERADAAN DAN KEBERLANGSUNGAN BAHASA DAN SASTRA KUTAI SERTA NILAI-NILAI LUHUR DAN KEBUDAYAAN KUTAI KARTANEGARA.	BARU	2024	2025	DPRD	LENGKAP PENKAJI BALAI BAHASA KALTIM
18.	PENYELENGGARA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	PELAKSANAAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO.	BARU	2023	2025	DPRD	LENGKAP PENGKAJI UNIKARTA
19.	KOTA RAMAH HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA, PEMERINTAH DAERAH BERKEWAJIBAN MENGHORMATI, MEMENUHI, MELINDUNGI, MENEGAKKAN, DAN MEMAJUKAN HAM.	BARU	2023	2025	DPRD	PENGKAJI KEMNEKUMHAM
20.	KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA	PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 9, 12, 30, 53a, 90 PERATURAN PEMERINTAH PENGANT	BARU	2023	2025	DPRD	LENGKAP PENGKAJI UNIKARTA

	KECIL, MENENGAH KUTAI KARTANEGARA	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA					
21.	PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KUTAI KARTANEGARA	PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENAGANAN KONFLIK SOSIAL DIATUR DALAM PERDA.	BARU	2023	2025	DPRD	PENGKAJI UNIKARTA
22.	PERUBAHAN PERDA NO 14 TAHUN 2014 TENTANG CAGAR BUDAYA KUTAI KARTANEGARA	STANDARISASI DAN STATUS CAGAR BUDAYA	UBAH	2024	2025	DPRD	
23.	SISTEM KESEHATAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA	PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT, MEMBERIKAN ARAH, LANDASAN DAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN.	BARU	2023	2025	BUPATI/ DINKES	MENCABUT PERDA KUTAI KARTANEGARA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG SISTIM KESEHATAN DAERAH
24.	KAWASAN TANPA ROKOK	PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 52 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012	BARU	2023	2025	BUPATI/DINK ES	-

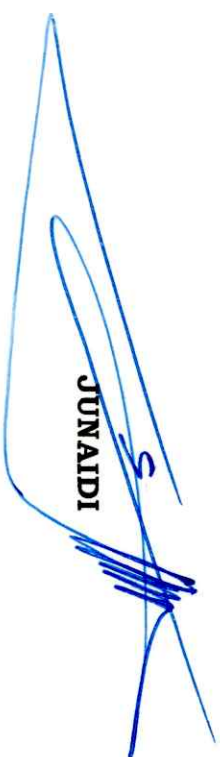
		PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU. PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 6 PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 188/MENKES/PB/1/2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK.					
25.	RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN (RP3KP)	PASAL 15 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	BARU	2023	2025	BUPATI/ DINAS PERKIM	
26.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENANGKAPAN IKAN	PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN	UBAH	2023	2025	BUPATI/ DINAS PERIKANAN	LUNCURAN TAHUN 2024
27.	PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2024	ANGGARAN	BARU	2024	2025	BUPATI	-
28.	APBD-P TAHUN 2025	ANGGARAN	BARU	2024	2025	BUPATI	-
29.	APBD TAHUN 2026	ANGGARAN	BARU	2024	2025	BUPATI	-

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.

EDY DAMANSYAH

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KUTAI KARTANEGARA**

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping loop at the beginning followed by several vertical strokes.

JUNAIDI